

BAB IX.

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Agenda pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan data dan informasi sebelumnya dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar tertuang sebagai program kerja, ditunjukkan dalam Tabel 9.1 :

Tabel 9.1 Program Kerja dan Indikator Hasil Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Tahun 2009

No	Program/Kegiatan	Indikator Hasil/Keluaran
1	Koordinasi penilaian kota sehat	Kondisi status lingkungan hidup Kota Denpasar
2	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">- Terpantaunya air sungai, laut dan kebisingan- Teridentifikasi pencemaran air sungai, laut dan kebisingan
3	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3)	<ul style="list-style-type: none">- Pengusaha dapat melakukan produksi bersih dan ramah lingkungan- Tersedia informasi/data pencemaran B3- Kesadaran pengusaha mengelola B3
4	Pengkajian dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Kesadaran/pemahaman dan implementasi produksi bersih, pentingnya lingkungan bersih, sehat dan ekosistem lestari.
5	Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih di Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none">- Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih melalui upaya pengelolaan limbah- Edukasi siswa tentang pengetahuan lingkungan meningkat
6	Koordinasi penilai langit biru	<ul style="list-style-type: none">- Pemantauan dan evaluasi udara ambien di Kota Denpasar- Penetapan kualitas udara ambien
7	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Terekomendasinya kegiatan wajib UKL,UPL dan Amdal
8	Konservasi sumberdaya air	<ul style="list-style-type: none">- Terpantau dan terkendalinya pemanfaatan ABT/AP- Terbinanya masyarakat dalam pemakaian ABT/AP
9	Pengelolaan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria	<ul style="list-style-type: none">- Termonitornya kondisi terumbu karang, terehabilitasinya terumbu karang di Sanur dan Serangan- Tersedia informasi kondisi terumbu karang
10	Peningkatan peran masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none">- Terhijaunya lahan
11	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Pahamiya masyarakat akan lingkungan hidup

		- Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai
12	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan	- Tersedia informasi yang layak bagi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan hidup
13	Peningkatan peran serta perempuan (gender) dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan	- Terbentuknya kelompok yang berperan dalam pengelolaan lingkungan

Berdasarkan isu lingkungan hidup utama dan isu lingkungan hidup lainnya, maka direkomendasikan program kerja tambahan yang merupakan agenda pengelolaan lingkungan hidup ditahun-tahun berikutnya. Rekomendasi tersebut dikelompokkan kedalam masing-masing bidang/media lingkungan hidup.

1. Bidang pencemaran air

1. Pengolahan limbah : selayaknya diendapkan dengan penambahan koagulan dan flokulan. Pengurasan endapan dilakukan secara teratur dan dilakukan pengujian toksisitas endapan.
2. Pendekatan dengan berbasis pada data pencemaran dan kondisi pengelolaan limbah usaha, pemerintah (instansi terkait) mendekati pengusaha untuk melakukan kesepakatan bersama berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan.
3. Bagi kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL), dilakukan penegasan kembali akan upaya kelola dan pantau merupakan kewajiban pengusaha yang harus dipatuhi.
4. Disarankan melakukan kontrol secara berkelanjutan terhadap kinerja unit yang meliputi peralatan dan tenaga manusia (SDM), agar *outlet* yang dihasilkan tetap layak dibuang ke lingkungan.
5. Pengolahan limbah dengan penyisihan materi organik dan anorganik harus dilakukan melalui pengendapan kemudian biofiltrasi melalui sistem tanaman yang memadai dengan kontrol secara berkelanjutan pada outlet.
6. Mewajibkan setiap usaha pencelupan yang membuat dan mengoperasikan bak pengolahan limbah sebelum limbah dibuang ke lingkungan.
7. Mensosialisasikan pemberlakuan ketentuan baku mutu limbah golongan II untuk setiap kegiatan usaha/industri.
8. Dalam skala kecil limbah laundry dapat ditangani dengan pengendapan yang dicampur dengan limbah lain kemudian diresapkan atau dengan biofiltrasi. Namun dalam skala besar mutlak dilakukan perlakuan kimia dengan koagulan dan flokulan yang dikombinasikan dengan peresapan.

9. Meningkatkan kesadaran dan partisipasinya pengusaha dalam menjaga lingkungan melalui sosialisasi hasil pemantauan lingkungan dan dampak pencemaran.
10. Mewajibkan dan mendorong pengusaha membangun dan mengoperasikan pengolahan limbah guna menekan pencemar yang dilepas ke lingkungan

2. Masalah Ketersediaan Air Bersih

1. Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah secara ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih bagi daerah-daerah yang rawan terintrusi air laut.
2. Melakukann kerjasama yang baik dan berkesinambungan antar instansi terkait dan pemerintah Kabupaten Gianyar, Tabanan, dan Badung dalam pengelolaan daerah tangkapan air hujan.
3. Mensosialisasikan gerakan efisien penggunaan air pada setiap aspek kehidupan.
4. Melestarikan sumber air yang telah ada dan mencari alternatif sumber-sumber air baru.

1. Permasalahan Banjir

1. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu dan berkesinambungan antar instansi yang terkait dan antar pemerintah kabupaten lain seperti Kabupaten Badung, Tabanan, dan Gianyar sesuai dengan kaedah konservasi tanah dan air.
2. Penataan pembangunan perumahan dengan baik, dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pihak-pihak yang melanggar.
3. Membuat peraturan pelarangan pembuangan sampah ke sungai ataupun ke saluran drainase air, dan menjadikan sungai-sungai di kota sebagai tempat rekreasi dan bukan tempat pembuangan sampah.
4. Melakukan penataan dan perbaikan tanggul-tanggul sungai dan got-got tempat saluran air hujan.

4. Pencemaran Udara

1. Penghapusan bahan bakar bensin bertimbal (salah satu materi dalam Program langit Biru) dan dengan spesifikasi yang tepat.

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor melalui sosialisasi di media elektronik (Radio Pemerintah Kota Denpasar) dan media cetak
3. Mengkampanyekan udara bersih melalui media elektronik (Radio Pemerintah Kota Denpasar) dan media cetak.
4. Membuat perencanaan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas seperti misalnya: membuat jalan alternatif serta menganjurkan bagi pemilik kendaraan untuk tidak parkir di badan jalan dan melakukan tilang (gembok parkir) bagi kendaraan yang parkir sembarangan.
5. Melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup
6. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara rutin sehingga Pemerintah Kota Denpasar mempunyai data yang akurat mengenai mutu udara di Kota Denpasar.
7. Pemberi insentif bagi kendaraan bermotor yang berpopulasi rendah antara lain Keringanan pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor yang menggunakan BBG berupa Keringanan Pajak Kendaraan (STNK) khusus kendaraan berbahan bakar gas (BBG atau LPG) selama periode tertentu.
8. Penentuan harga jual bahan bakar yang berwawasan lingkungan (Mogas Unleaded dan Gas) dengan harga menarik bagi konsumen
9. Pemberian keringanan pajak untuk bea masuk peralatan konversi (*Conversion Kit*), sehingga harga jualnya dapat ditekan dan terjangkau oleh masyarakat.

5. Lahan dan Hutan

1. Perijinan terhadap pembangunan perumahan yang berasal dari lahan pertanian agar diperketat dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang melanggar.
2. Menetapkan jalur hijau yang dilakukan dengan pengukuran dan pematokan di lapangan serta dituangkan ke dalam landasan hukum.
3. Melanjutkan dan memperluas program penghijauan kota.
4. Mengalokasikan tempat untuk ruang terbuka hijau secara detail dalam bentuk taman kota, fasilitas olah raga/rekreasi, tempat pemakaman, areal pertanian, hutan kota, sempatan sungai dan jurang, sempatan perbatasan wilayah dll.
5. Penanganan dan penataan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan terhadap telajakan dan ruang terbuka pekarangan.

6. Keanekaragaman Hayati

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelestarian lamun.
2. Tingkatkan usaha dibidang penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya melestarikan flora langka.
3. Mendorong kesertaan masyarakat maupun industri dalam mengikuti program pembangunan berkelanjutan /ramah lingkungan.
4. Teruskan pemberian penghargaan bagi berbagai pihak yang berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. Secara konsisten memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang menebang tanaman langka.
6. Penyuluhan / pendidikan masyarakat akan pentingnya pelestarian burung.
7. Melarang menangkap, berburu / penembakan burung di seluruh wilayah Kota Denpasar.
8. Melibatkan banjar & desa pekraman, serta anak-anak sekolah dalam pelestarian burung, khususnya burung-burung langka dan endemik.
9. Menyediakan dana, sarana dan SDM untuk penyemprotan dan penyuluhan serta penanganan kasus flu burung.
10. Meningkatkan pemahaman masyarakat di dalam mencegah dan menangani penyakit flu burung.
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam mencegah dan menangani kasus flu burung.
12. Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian reptilia langka / pemberian penghargaan terhadap perusahaan ramah lingkungan.dilindungi.
13. Mencari sumber pendapatan alternatif bagi anggota masyarakat yang menggantungkan diri dari usaha tataniaga reptil langka/dilindungi, misalnya melalui pengembangan ekowisata.
14. Tingkatkan manfaat /insentip yang diperoleh oleh berbagai pihak yang mempunyai peran dalam mencegah dan/atau menangani pencemaran.
15. Mencegah dan menangani pencemaran lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan.
16. Operasional IPAL secara maksimal

7. Kerusakan Mangrove

1. Mengurangi sampah plastik ke daerah mangrove dengan instansi pelaksana Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup

2. Mengawasi pengambilan biota di mangrove, dengan instansi pelaksana Dinas Pertanian dan kelautan
3. Mengawasi konversi mangrove, dengan instansi pelaksana Dinas Kehutanan dan Pertanahan
4. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya mangrove bagi masyarakat dengan instansi pelaksana Dinas Kehutanan
5. Merehabilitasi dan penanaman mangrove di areal yang mangrovenya rusak/jarang dengan instansi pelaksana Dinas Kehutanan dan JICA.
6. Memantau tingkat pencemaran minyak ke areal mangrove dengan instansi pelaksana Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup

8. Abrasi Pantai

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mengambil material di pantai dengan instansi pelaksana Dinas Pekerjaan Umum
2. Memprioritaskan penanganan abrasi di Pantai Padanggalak hingga Matahari Terbit dengan instansi pelaksana Dinas Pekerjaan Umum
3. Membuat jalan setapak sebagai pembatas antara pemilik pribadi dengan akses publik di Pantai Padanggalak hingga Matahari Terbit dengan instansi pelaksana Dinas Pekerjaan Umum
4. Mengembalikan jenis-jenis vegetasi alami pantai yang dulu banyak tumbuh di tempat tersebut dengan instansi pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
5. Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam mengawasi pembangunan di pantai instansi pelaksana Bappeda Kota Denpasar.
6. Menertibkan pelanggar sempadan pantai bersama aparat berwenang, dengan instansi pelaksana Dinas Pekerjaan Umum.

9. Kerusakan Terumbu Karang

1. Melanjutkan program transplantasi karang yang telah dilakukan kelompok masyarakat dengan instansi pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Kelautan
2. Melanjutkan pemantauan areal-areal tertentu agar karang berkesempatan untuk pulih dengan instansi pelaksana Dinas Lingkungan Hidup

3. Menentukan zone-zone larangan di tempat tertentu untuk kurun waktu tertentu untuk memberikan kesempatan karang dan lamun tumbuh dan pulih secara alami dengan instansi pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
4. Mengelola DAS pada sungai dan anak sungai yang bermuara di kawasan pantai Padang Galak, Sanur, dan Teluk Benoa, agar dapat mengurangi erosi dan sedimentasi sehingga terumbu karang dan padang lamun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan instansi pelaksana Dinas Pekerjaan Umum
5. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan pengawasan yang ketat akan kemungkinan terjadinya pengambilan karang secara destruktif dengan instansi pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
6. Memberikan apresiasi terhadap usaha-usaha masyarakat yang turut melestarikan karang dengan instansi pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
7. Mengawasi aktivitas masyarakat dan wisatawan yang berekreasi di atas karang di waktu surut, agar seminimal mungkin menginjak karang hidup dengan instansi pelaksana Dinas Pariwisata

10. Sanitasi dan Pemukiman Kumuh

1. Untuk menekan pertumbuhan dan berkembangnya kawasan pemukiman padat/kumuh perlu dibuat suatu kebijakan yang mengatur tentang sistem sewa menyewa lahan khususnya berkaitan dengan peruntukan tanah sewa.
2. Perlu ada koordinasi antara pihak pemerintah dan masyarakat (pemilik lahan), sehingga di Kota Denpasar memungkinkan dibangun kawasan pemukiman yang memadai yang dari segi harga terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah dan sekaligus memenuhi standar kesehatan.
3. Dilakukan pemantau/penilai terhadap kondisi sanitasi di sekitar kawasan pemukiman padat/kumuh, khususnya pada wilayah pemukiman padat/kumuh yang belum terjangkau program Sanimas.
4. Dalam penilaian terhadap kondisi sanitasi Kota Denpasar perlu dilakukan evaluasi, sehingga nantinya tersedia informasi tentang cakupan sanitasi per kecamatan se Kota Denpasar.
5. Meningkatkan penyuluhan/pembinaan tentang sanitasi di kawasan pemukiman padat/kumuh.
6. Terjadi pencemaran perairan sumur dan sungai di wilayah Kota Denpasar merupakan dampak dari sanitasi buruk pada kondisi sebagian masyarakat

dan masih adanya pembuangan limbah padat maupun cair ke sungai. Maka dari itu program pemisahan /pengamanan bahan beracun dan berbahaya (B3) dari sampah lainnya perlu terus ditekankan.

7. Perkembangan industri kecil seperti pencelupan, perbengkelan, kegiatan dibidang kelistrikan/elektronik dan pangan masyarakat Kota Denpasar terus terjadi, maka perlu diwajibkan penerapan sistem pengolahan limbah berupa septik dan peresapan pada setiap kegiatan tersebut.
8. Potensi wabah penyakit diare, disentri dan penyakit yang berkaitan dengan bakteri bersumber dari pembuangan tinja dan limbah cair yang tidak saniter maka perlu ditingkatkan penerapan septik tank pada sistem pembuangan kotoran keluarga

11. Permasalahan sampah

1. Pengembangan program perlindungan sungai, hutan hingga di seluruh wilayah dan hulu kota
2. Peningkatan dukungan dan bantuan terhadap penerapan sistem pengelolaan sampah swakelola oleh masyarakat.
3. Peningkatan dukungan, bantuan dan pengelolaan lanjutan bagi kelompok masyarakat/instansi/sekolah yang melaksanakan 3R di sumber.
4. Perluasan penyediaan sarana dan sistem pengangkutan bagi lokasi kota yang sebelumnya tidak terjangkau.
5. Adanya upaya pemantauan terhadap pembuangan sampah di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau sistem pengelolaa DKP.